

Refleksi Budaya Politik dan Perilaku Memilih Suku Sunda

Ari Ganjar Herdiansah¹ dan Husin M. Al-Banjari²

^{1,2} Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Received: (26 Desember 2022)

Revised: (19 Maret 2023)

Published: (30 April 2023)

Abstrak:

Tulisan ini mencoba mengungkap gambaran budaya politik etnis kontemporer yang dapat dicapai melalui pendekatan perilaku memilih dan kajian budaya etnis. Studi dilakukan pada etnis Sunda, kelompok etnis terbesar kedua di Indonesia yang memiliki dampak elektoral signifikan pada tingkat nasional tetapi tidak banyak literatur yang membahas budaya politiknya. Menggunakan metode gabungan kuantitatif berbasis survei dan kualitatif berbasis studi literatur, hasil penelitian menunjukkan bahwa penekanan pemilih Sunda terhadap pertimbangan faktor agama dan etnis dimaknai sebagai tuntutan etika dan keharmonisan nilai budaya ketimbang konservatisme agama. Pemilih Sunda menyukai kandidat yang mewakili nilai-nilai ideal kepemimpinan Sunda, seperti cerdas, ramah, santun, dan berwibawa. Gambaran tersebut sejalan dengan karakteristik dualitas budaya politik Sunda yang di satu sisi mengedepankan keharmonisan, taktik, dan penghormatan; sedangkan di sisi lainnya cenderung pasif dan menghindari cara konfrontatif.

Keywords:

perilaku memilih; etnisitas; budaya politik; etnis sunda

Pendahuluan

Pembahasan tentang hubungan etnisitas dan politik pada demokrasi multi etnik dewasa ini menekankan pada pengaruh identitas etnik terhadap demokratisasi. Long dan Gibson (2015) misalnya, menyoroti faktor etnis sebagai prediktor dari pilihan suara. Di Indonesia, menguatnya identitas etnik dan agama dalam kontestasi pemilihan umum (Pemilu) sepanjang tahun 2014-2019 telah mendorong para peneliti untuk menganalisis dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Seperti pada Pilkada tahun 2015 dan 2018, geliat politik etnik terjadi di Kalimantan pada Suku Dayak dan Suku Melayu (Kristianus, 2016; Liadi & Erawati, 2020), di Nusa Tenggara Timor pada Suku Timor (Kolne & Festianto, 2018; Nope, Herdiansah, & Darmawan, 2021), dan di Makassar pada suku-suku di Sulawesi Selatan (Bareilly, Muhammad, Kambo, & Abdillah, 2021). Namun, ketika penelitian-penelitian tersebut cenderung memberikan perhatian pada kontestasi elektoral, kajian tentang deskripsi budaya politik etnik jarang sekali ditemukan. Padahal kajian tersebut

Korespondensi:

Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
Email: ari.ganjar@unpad.ac.id

penting dalam memahami ciri dan karakter kelompok etnik yang dipengaruhi oleh proses politik kontemporer seperti pemilihan.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) pendekatan untuk mendapatkan gambaran budaya politik, yaitu pendekatan behaviorisme (ilmu politik), antropologis, dan sosiologis. Pendekatan behaviorisme cenderung dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang elemen kognisi dan sikap warga suatu bangsa terhadap sistem politik. Karya dari Almond & Verba, yaitu *The Civil Culture: Political Attitude and Democracy in Five Nations* (1963); merupakan pionir kajian budaya politik behavioris yang mengategorikan karakteristik partisipan, subyek, parokial, subyek-kritis, dan partisipan-kritis (Almond & Verba, 1963). Kajian budaya politik secara makro yang merevisi kecenderungan eurosentrisme dari Almond & Verba dilakukan oleh (Foster, 1982) yang menyoroti budaya politik sebagai kumpulan nilai dan keyakinan yang dirasakan secara mendalam dan meresap pada kegiatan politik dan pemerintahan di suatu masyarakat.

Ketika pendekatan di atas cenderung digunakan pada skala bangsa, pendekatan dari tradisi antropologi dengan kekuatan etnografinya telah menyediakan gambaran yang detail dan mendalam tentang budaya politik etnik. Beberapa diantaranya Geertz (1976) yang mendeskripsikan budaya politik Jawa dengan kategorinya yang terkenal yaitu priayi, abangan, dan santri; Barth (1959) tentang kepemimpinan politik pada etnik Pathans di Pakistan, dan van Bruinessen (1989) tentang struktur sosial dan politik masyarakat Kurdi. Namun, gambaran budaya politik etnik yang mendalam memerlukan proses penelitian yang panjang dan karenanya, selain tidak banyak, kajian budaya politik etnik juga kurang mendapatkan pembaruan yang menyangkut isu-isu politik kontemporer.

Salah satu isu penting dalam bahasan budaya politik etnik kontemporer adalah bagaimana keterkaitannya dengan kontestasi Pemilu yang dinamis. Kajian yang menghubungkan budaya politik dengan etnisitas cenderung menempatkan etnik sebagai variabel yang menjelaskan budaya politik, seperti yang ditunjukkan oleh Nelson (1979) bahwa modernisasi dan nasionalisme ternyata tidak melunturkan faktor etnisitas dalam membentuk partisipasi politik. Pengaruh etnisitas tetap penting bersamaan dengan status sosio ekonomi, umur, jenis kelamin, dan tempat tinggal. Tema lain dari budaya politik etnik berkisar pada seberapa besar faktor etnis berpengaruh dalam kejadian Pemilu. Beberapa kajian di negara-negara Afrika mengungkapkan pengaruh faktor etnis yang signifikan (Gowricharn, 2019). Sementara untuk kasus Pemilu nasional di Indonesia, faktor etnis cenderung lemah (Liddle & Mujani, 2007). Namun dalam konteks politik lokal, etnisitas memberikan ciri tersendiri sehingga dapat dibedakan antara budaya politik pada suatu etnis dengan etnis lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Zuhro et al. (2009) tentang politik lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali.

Di antara tema-tema yang ada, belum banyak kajian yang mengungkapkan bagaimana budaya politik suatu etnik tercermin dalam perilaku memilih. Kajian

tersebut penting dalam upaya memahami nilai dan tradisi suatu etnik yang senantiasa berproses dengan struktur dan lembaga politik. Di tengah keterbatasan tersebut, tulisan ini mencoba menyediakan gambaran budaya politik pada etnis Sunda pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) tahun 2018. Tulisan ini mencoba menjelaskan apakah karakteristik budaya etnik menentukan preferensi pilihan? Ataukah pilihan terhadap kandidat atau partai politik mencerminkan ciri-ciri budaya etnik?

Untuk mencapai penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan di atas, tulisan ini mengacu pada pendekatan budaya politik yang sosiologis-analitis seperti yang diungkapkan oleh Berezin et al., (2020) dan Burns (1996). Berezin et al., (2020) membedakan politik dalam budaya (*politics in culture*) dan budaya dalam politik (*culture in politics*). Pada konsep *politics in culture*, ia menyoroti relasi-relasi kuasa dan berbagai konsekuensi atas struktur kuasa hadir dalam praktik-praktik budaya. Di sisi lain, konsepsi *culture in politics* berupaya mengungkapkan nilai dan makna budaya dalam pelbagai praktik politik. Sementara itu, Burns (1996) menekankan pada penggunaan simbol dan bahasa serta interpretasi yang beragam pada suatu masyarakat terhadap sistem politik, partisipasi politik, dan pengaturan kekuasaan politik. Pendekatan tersebut menuntut strategi metode pragmatis, yakni melalui kombinasi antara kajian perilaku memilih dan kajian budaya politik etnik. Pendekatan perilaku memilih dapat mengungkapkan ciri budaya politik etnik dalam pemilihan sebagai *culture in politics*, sedangkan kajian interpretasi politik dari sisi etnisitas dapat menunjukkan bagaimana pemilihan dikonsepsikan dalam nilai-nilai budaya sebagai *politics in culture*.

Kajian perilaku memilih dalam penelitian ini diambil dari dataset *exit poll* Pilgub Jabar tahun 2018. Beberapa aspek yang disorot dalam dataset tersebut adalah: (1) faktor etnisitas, sosio kultural, dan afilitasi politik, (2) faktor karakteristik personal kandidat, dan (3) isu sosial ekonomi. Sementara itu, pembacaan terhadap kajian budaya politik Sunda dilakukan pada karya-karya deskripsi budaya seperti yang disusun oleh Warnaen (1987) yang menyatakan orang Sunda cenderung menghindari persaingan dan lebih mengutamakan kerjasama. Karya lainnya berasal dari Al-Banjari (2017: 309) di dalam disertasinya "*Budak Angon: Diskursus Kepemimpinan Sunda Menuju Kekuasaan*" yang menegaskan tesis Warnaen (1987) bahwa jenis kekuasaan orang Sunda mengandaikan pada peran deterministik *knowledgical power*.

Pemilihan suku Sunda sebagai subyek penelitian dilatar-belakangi oleh beberapa pertimbangan. Pertama, suku Sunda merupakan etnis dengan populasi terbesar di Indonesia setelah suku Jawa dengan 48,27 juta jiwa atau sekitar 15,5 persen dari total penduduk Indonesia (BPS-Jabar, 2020). Kedua, dalam konteks politik nasional, suku Sunda memiliki pengaruh signifikan dalam hal elektoral karena memiliki jumlah pemilih yang besar (dengan asumsi proporsi yang sama dengan populasi, yakni sekitar 15,5 persen dari total pemilih). Oleh karena itu, suku Sunda dianggap sebagai salah satu kelompok etnis yang memiliki peran penting dalam

menentukan hasil politik nasional. Ketiga, suku Sunda mendiami daerah yang terdampak dinamika ekonomi dan politik nasional. Jabar merupakan daerah yang secara ekonomi terbilang maju, tetapi tingkat kemiskinan dan penganggurannya termasuk yang tertinggi di Indonesia. Isu-isu politik nasional seringkali berdampak secara resiprokal dan mempengaruhi dinamika politik lokal, seperti maraknya mobilisasi massa dan kasus intoleransi dari beberapa kelompok keagamaan (Hamayotsu, 2021; Pelletier, 2021). Selain itu, representasi politik yang rendah pada etnik Sunda (Sujatmiko, 2014) berpotensi mengeskalasi dinamika politik baik di tingkat lokal maupun nasional.

Dengan demikian, penggambaran budaya politik etnik pada suku Sunda dapat menyediakan pemahaman tentang karakteristik, nilai, dan sikap orang Sunda dalam struktur dan proses politik. Pemahaman tersebut dapat memperkaya kajian politik tentang Sunda yang masih terbilang minim. Berbeda dengan kajian politik suku-suku besar lainnya di Indonesia yang telah mendapatkan porsi dalam kajian ilmiah, seperti Jawa, Minangkabau, Makassar, dan Bali (Zuhro et al., 2009), kajian tentang politik Sunda terbilang masih sulit ditemukan. Oleh karena itu, selain dapat lebih memahami karakteristik budaya politik Sunda, ketersediaan literatur gambaran budaya politik Sunda juga dapat mendorong proses politik yang lebih inklusif.

Etnisitas dan Perilaku Memilih

Hubungan antara etnisitas dan politik, terutama dalam ajang Pemilu terbilang kompleks. Faktor etnik dapat terlihat menonjol pada masyarakat atau negara yang mengalami perpecahan sehingga para pemilih mengevaluasi kandidat atau partai berdasarkan label etnik (Chandra, 2014). Horowitz (1985) menerangkan bahwa terdapat 2 (dua) bentuk penjelasan perilaku memilih berdasarkan etnik. Pertama, kelompok etnik memilih kandidat satu etnik karena preferensi psikologis untuk mempertahankan status komunitas etnik dalam kesatuan politik. Tindakan memilih berdasarkan etnik merupakan ekspresi keterhubungan seseorang dengan kelompok etnik dan memperkuat rasa memiliki (*sense of belonging*). Kedua, memilih berdasarkan etnik juga berlatar-belakang kepentingan untuk menguasai atau mengendalikan sumber daya bagi kelompoknya. Perilaku semacam ini dikatakan juga bermotif instrumental, dimana kandidat, partai, atau koalisi yang merepresentasikan kepentingan kelompok etnik berupaya menunjukkan keuntungan yang diperoleh oleh etnik tertentu dalam janji kampanye.

Namun, perilaku memilih dengan ciri etnisitas dapat melemah karena perkembangan situasi sosial, politik, dan ekonomi. Meskipun kelompok etnik memiliki ikatan komunal yang dibangun dan dipelihara melalui sosialisasi, ikatan primordial dapat berubah akibat pengaruh modernisasi, persaingan politik, dan perubahan demografis (Hale, 2004). Di banyak tempat, pemilih perkotaan dianggap kurang menekankan pada identitas dan institusi tradisional seperti kesukuan atau tokoh-tokoh etnik yang mengikat mereka pada kelompok etnis. Pemilih kelas

menengah dan menengah keatas serta berpendidikan yang terkonsentrasi di perkotaan cenderung lebih mempertimbangkan faktor kebijakan atau kualitas kandidat ketimbang faktor sesama etnis (Robinson, 2014).

Meskipun hubungan antara perilaku memilih dan etnisitas dianggap kurang relevan seiring dengan urbanisasi dan modernisasi, keduanya tetap memiliki signifikansi dengan derajat yang beragam. Etnisitas tetap menjadi isu yang abadi dalam proses-proses politik yang demokratis (Nathan, 2016). Di India, misalnya, Chauchard (2016) mengungkapkan bahwa faktor etnis sama sekali tidak hilang dalam pertimbangan pemilih. Namun, faktor etnis dimediasi oleh faktor-faktor lain seperti kondisi sosio ekonomi, sehingga pengaruhnya sulit diidentifikasi dalam perilaku memilih. Dengan kata lain, etnisitas tidak pernah diabaikan dalam setiap kompetisi elektoral. Dari sisi kandidat atau partai politik, mereka pun seringkali melakukan pendekatan instrumentalis ketika berada di tengah-tengah masyarakat multi etnik. Dari pengalaman di berbagai negara, para kandidat dan partai-partai politik menggunakan strategi kombinasi etnis pada pasangan kandidat untuk memperluas basis pemilih (Madrid, 2010).

Perilaku memilih dalam konteks etnisitas bukan merupakan variabel tunggal melainkan berkelindan dengan faktor-faktor lainnya. Para pemilih mengedepankan faktor identifikasi partai, kinerja, dan kualitas personal kandidat. Di Indonesia, pada Pemilu di tingkat nasional, faktor identifikasi partai politik terbilang signifikan untuk Pemilu legislatif. Akan tetapi, faktor tersebut tidak signifikan pada pemilihan presiden (Pilpres) karena pemilih lebih mengutamakan sosok kandidat (Liddle & Mujani, 2007). Sementara itu, faktor pembelahan agama (*religious cleavage*) masih berpengaruh dalam perilaku memilih karena adanya korelasi karakter keagamaan di daerah dengan perolehan suara partai politik bercorak Islam. Para pemilih di perkotaan juga cenderung memilih partai politik yang sedang berkuasa, yang terindikasi dari meroketnya suara Partai Demokrat di tahun 2009, tetapi kemudian menyusut drastis pada tahun 2014 di saat Susilo Bambang Yudhoyono selesai menjabat presiden (Higashikata & Kawamura, 2015).

Meski faktor etnis kurang menonjol dalam Pemilu di Indonesia, penting untuk dicatat bahwa misalnya dalam Pilpres berlaku falsafah politik bahwa kandidat presiden selalu berasal dari suku Jawa, berbanding lurus dengan populasi etnis Jawa, yakni sekitar 40 persen atau terbesar nasional. Pertanyaannya, ketika faktor etnis dan kinerja kandidat, atau partai politik menjadi pertimbangan, dalam kondisi apa pemilih menggunakan kedua faktor tersebut dalam menentukan pilihan? Pada konteks demokrasi di Afrika, Long & Gibson (2015) mengungkapkan bahwa pengutamaan etnisitas dan kinerja tergantung pada bagaimana pemilih mengevaluasi sesama etnis dan calon petahana. Pemilih sesama etnis berkoordinasi dan membentuk blok, sedangkan non-etnis lebih cenderung membagi dukungan mereka di antara kandidat. Sementara kinerja petahana penting bagi semua pemilih yang terlepas dari etnisitas, pemilih cenderung mengabaikan kinerja buruk petahana yang sesama etnis.

Temuan di atas sejalan dengan hasil penelitian Mujani (2020) pada studi di Pilgub Jakarta tahun 2018 yang menyatakan bahwa faktor identitas agama dan etnik menjadi signifikan karena para kandidat mewakili golongan kelompok agama dan etnik yang berbeda, ditambah isu agama menjadi krusial pada saat Pemilu berlangsung. Sementara itu, Dobratz et al., (2016) mengungkapkan bahwa dalam kondisi Pemilu yang tanpa diganggu isu-isu agama atau etnik, pemilih akan mempertimbangkan isu-isu politik alternatif yang disodorkan oleh kandidat. Artinya, pengutamaan etnis dapat terjadi dalam kondisi dimana terdapat isu-isu yang menyebabkan masyarakat mengalami penguatan identitas etnis ketika menghadapi Pemilu. Namun, tanpa adanya isu-isu identitas, pemilih akan memilih kandidat yang dari aspek isu dianggap dapat memberikan manfaat bagi mereka.

Penelitian ini memilih metode penelitian kombinasi (*combined method*) kualitatif dan kuantitatif, yang menggabungkan antara pembacaan budaya politik dengan data perilaku memilih *urang* Sunda berdasarkan hasil survei *exit poll* Pilgub Jabar tahun 2018. Pendekatan kuantitatif dengan *exit poll* dilaksanakan oleh Pusat Studi Politik dan Demokrasi Universitas Padjadjaran pada Juli 2018. Lebih jauh, analisis data *exit poll* digunakan untuk membaca kecenderungan perilaku memilih Sunda pada saat ini. Dalam membangun instrumen *exit poll*, studi ini terinspirasi oleh pendekatan riset perilaku pemilih yang menggabungkan aspek sosiologis, psikologis, maupun rasional. Tetapi, kami menerapkan pendekatan tersebut tidak secara utuh melainkan konvergen dengan tujuan mengidentifikasi bagaimana pertimbangan etnik, agama, kinerja pemerintahan, dan isu-isu sosial ekonomi dalam kecenderungan pemilih Sunda dalam menentukan pilihannya.

Pada survei *exit poll*, teknik *sampling* menggunakan kluster *random sampling*, yang dimulai di tingkat kabupaten/kota sebanyak 28 kabupaten/kota, lalu dilakukan pemilihan Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara acak di tingkat kecamatan. Dari hasil *sampling* terhadap 66.314 TPS di seluruh Jabar, diperoleh 412 TPS sebagai *sampel* dan tiap-tiap TPS dipilih 2 (dua) orang responden (1 laki-laki dan 1 perempuan) secara acak. Karena ada 1 kuesioner yang rusak, maka jumlah responden yang dihitung dalam survei ini adalah sebanyak 823 responden. Dari sejumlah responden itu, sebanyak 72 persen berasal dari suku Sunda. Hal tersebut sesuai dengan proporsi suku Sunda di Jabar yang diperkirakan sekitar 70-75 persen. Suku lainnya antara lain suku Jawa 18,8 persen, suku Batak 1,8 persen, suku Minangkabau 1,2 persen, dan Tionghoa 1 persen. Tiap responden yang diwawancarai adalah pemilih yang telah selesai mencoblos di kotak suara. Di dalam kuesioner, kami menanyakan pertimbangan responden memilih kandidat gubernur/wakil gubernur berdasarkan kesamaan agama, suku, keluarga, ketokohan, dan partai politik. Dalam kuesioner itu juga digali preferensi pemilih dari aspek karakteristik kandidat seperti tegas/berwibawa, sopan, dan citra anti-korupsi. Lebih jauh lagi, kuesioner juga menyoroti isu-isu sosial ekonomi yang dianggap penting oleh responden dalam konteks Pilgub Jabar tahun 2018.

Pembacaan analisis dilakukan secara deskriptif dengan memperhatikan seberapa besar responden difokuskan pada deskripsi kekhasan perilaku memilih orang Sunda di Jabar, sebagaimana terindikasi dari hasil survei *exit poll* Pilgub Jabar tahun 2018. Kajian ini menyoroti 4 (empat) faktor utama yang dapat mempengaruhi corak perilaku pemilih berdasarkan etnik, yaitu (i) latar belakang sosio-kultural kandidat, termasuk etnis dan agama; (ii) karakteristik personal kandidat, dan (iii) persepsi tentang isu-isu sosial ekonomi. Dalam pembahasan data kuantitatif, kami juga melakukan beberapa perbandingan perilaku memilih pemilih Sunda dengan pemilih suku-suku lainnya, antara lain suku Jawa, suku Minangkabau, suku Batak, dan etnis Tionghoa. Hal tersebut untuk mendapatkan informasi tentang kekhasan perilaku memilih orang Sunda dibandingkan suku-suku lainnya yang juga tinggal di Jabar. Kedua analisis tersebut berporos pada diskusi tentang perilaku politik orang Sunda.

Budaya Politik *Urang Sunda*

Ciri budaya politik orang Sunda dapat diidentifikasi dari konsep kekuasaan yang terkandung dalam nilai kehidupan orang Sunda. Jakob Sumarjo melukiskan konsep kekuasaan orang Sunda yang erat kaitannya dengan sistem ladang berpindah atau ber-huma, dimana sikap paradoksal dalam arti positif seringkali muncul dalam perilaku orang Sunda. Pola ladang berpindah menuntut orang beradaptasi dalam keadaan tidak tentu, seperti menyatu-memisah, asli-berubah, menerima-mempertahankan, bebas-bergantung, dan terbuka-tertutup. Ciri kekuasaan Sunda juga tercermin dari cerita pantun tentang Pangeran Padjadjaran, Mundinglaya Dikusumah yang digambarkan 'diam dan pasif' tetapi keputusannya selalu dihormati. Sementara itu, dua pengawalnya memiliki karakter yang berbeda. Gelap Nyawang berkarakter pemikir dan pengatur strategi. Kidang Pananjung sebagai penyelesaian persoalan. Ketiga karakter tersebut menandakan konsep kekuasaan Sunda yang tidak mutlak dan saling berbagi. Berkuasa tapi tak menjalankan kekuasaan, dan yang menjalankan kekuasaan tak memiliki kekuasaan, serta ada pihak yang menjalankan tugas menjaga persatuan (Sumardjo, 2015: 162-164).

Konsep kekuasaan atau politik orang Sunda yang menyiratkan kepasifan dan kewibawaan juga terungkap dalam penelitian Al-Banjari yang menggali dan mengonseptualisasi ulang diskursus kepemimpinan dan kekuasaan Sunda berdasarkan tradisi tutur Sunda. Di antaranya memang benar bahwa orang Sunda itu sebenarnya menginginkan kekuasaan, tetapi jenis kekuasaan yang mengandaikan pada peran deterministik dari pengetahuan, yang oleh disertasi tersebut disebut dengan *knowledgical power*. Inilah simpulan kata kunci yang menjadi titik unggul sekaligus titik lemah orang Sunda dalam konteks kekuasaan nasional, bahwasanya "kekosongan *knowledgical power* berarti tidak ada struktur pemaknaan dan formasi diskursus yang berhasil untuk menjadi 'standar kenormalan' baru yang dengannya

muncul artikulasi politik alternatif yang lebih rasional, aplikatif, dan mencerahkan” (Al-Banjari, 2017).

Hasil penelitian di atas menguatkan temuan sebelumnya, misalnya seperti diungkapkan oleh Warnaen (1987: 207) tentang perilaku politik Sunda, bahwa “kedudukan adalah suatu yang harus dikejar, tetapi dalam pengejarannya diharapkan seseorang hanya mengejar suatu yang memang layak baginya”. Lebih tegas lagi disebutkan, bahwa orang Sunda “menghindari rebutan kekuasaan atau rebutan pengaruh dan lebih menghargai musyawarah dalam suasana kekeluargaan” (Warnaen, 1987: 28). Artinya, orang Sunda sejatinya tidak menyukai politik apalagi politik yang kotor yang hanya mengejar kekuasaan dan abai terhadap kelayakan diri untuk berkuasa. Di sinilah posisi penting orang Sunda yang tidak banyak dipahami kalangan umum, bahwa orang Sunda itu mempunyai karakter “menghindari persaingan dan lebih mengutamakan bekerja bersama-sama”. Anggapan bahwa politik Sunda cenderung pasif diperkuat oleh fakta minimnya keterwakilan politik orang Sunda di tingkat nasional. Hanya sedikit pejabat atau politikus pusat yang berasal dari etnik Sunda akibat jaringan sosial orang-orang Sunda dianggap kurang mampu menembus struktur politik nasional (Sujatmiko, 2014).

Karakteristik budaya politik pasif yang dimiliki orang Sunda bukan berarti mereka sama sekali tidak atau enggan berpolitik. Penelitian Qodim (2013) yang mengkaji soal organisasi politik Sunda mengungkapkan bahwa perjuangan identitas politik Sunda dilakukan dalam 2 (dua) ranah. Pertama, ranah pendidikan karena sempat mengalami kegagalan dalam politik praktis seperti yang ditunjukkan Paguyuban Pasundan. Kedua, ranah politik praktis dengan keterlibatan tokoh-tokohnya di partai politik dan berbagai perhimpunan seperti Duta Sawala Barisan Olot Sunda. Meskipun dalam tataran politik praktis kurang berhasil, keduanya membuka kembali wacana orientasi kekuasaan Sunda dalam kepemimpinan nasional. Sementara itu, (Syukur, 2011) menyoroti identitas politik Sunda yang kental dengan keislaman karena kesamaan pandangan falsafah budaya dengan ajaran Islam dan memiliki etos keagamaan yang tinggi. Budaya politik dengan corak keislaman pada sebagian besar orang Sunda juga diperkuat oleh berbagai kebijakan kepala daerah yang pro keagamaan. Adanya aspek keislaman dalam diri mayoritas *urang* Sunda mencirikan budaya politik mereka yang religius, dimana hal tersebut dapat memberikan corak dalam perilaku memilih mereka.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018

Pilgub Jabar tahun 2018 merupakan ajang pemilihan langsung kepala daerah Jabar yang ketiga, sejak pertama kali dilakukan pada tahun 2008. Kontestasi politik ini ditujukan untuk menentukan gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2018-2023. Pilgub Jabar tahun 2018 diselenggarakan pada 27 Juni 2018, yang mana pada waktu itu pelaksanaannya bersamaan dengan Pilgub di daerah lainnya atau Pilkada serentak gelombang ketiga. Mekanisme pencalonan pada Pilgub Jabar tahun 2018 ditentukan

oleh besaran suara yang dimiliki oleh partai politik. Untuk dapat mengajukan calon gubernur atau wakil gubernur, partai politik atau gabungan partai politik harus mempunyai setidaknya 20 persen suara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat.

Pada Pilgub Jabar tahun 2018, terdapat 3 (tiga) gabungan partai politik yang saling bekerjasama dan satu partai politik yang berhak mengusung pasangan kandidat. Mereka di antaranya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang mengusung Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum; Partai Golkar dan Demokrat mengusung Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi; Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengusung Sudrajat dan Ahmad Syaikh. Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memiliki 20 persen kursi di DPRD Jawa Barat berhak menyalonkan kandidat gubernur dan wakil gubernur tanpa harus bergabung dengan partai politik lainnya, dengan mengusung Tb. Hasanudin dan Anton Charliyan. Pasangan-pasangan kandidat tersebut memperoleh nomor urut sebagai berikut: Ridwan Kamil-Uu (Rindu, No. 1), Deddy-Dedi (2DM, No. 2), Sudrajat-Syaikh (Asyik, No. 3), dan Tb. Hasanudin-Anton (Hasanah, No. 4).

Dari aspek latar belakang sosio-kultural, hampir semua kandidat mengidentifikasi dirinya sebagai orang Sunda di hadapan publik. Kebanyakan kandidat telah dikenal oleh warga Jabar. Mereka diantaranya Ridwan Kamil, yang merupakan walikota Bandung periode 2013-2018. Ia berasal dari kalangan aktivis perkotaan yang sukses mencanangkan berbagai program terobosan di Kota Bandung, yang seringkali dikemas dengan ciri khas budaya Sunda, seperti Rebo Nyunda (berpakaian adat Sunda di lingkungan pemerintahan dan sekolah setiap hari Rabu). Pasangan Ridwan Kamil, Uu Ruzhanul Ulum, pernah menjabat sebagai bupati Tasikmalaya. Tokoh ulama dan politikus PPP tersebut juga sering berpenampilan atau mengusung budaya Sunda. Pada pasangan No. 2, Deddy Mulyadi merupakan bupati Purwakarta periode 2008-2018, sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jabar, yang dikenal gencar mempromosikan budaya Sunda dalam berbagai kebijakannya, seperti mengganti istilah masjid agung dengan nama tajug gede.

Sementara kandidat atau pasangan kandidat lainnya kurang begitu kuat teridentifikasi ke-Sunda-annya. Dedy Mizwar merupakan seorang aktor kawakan berdarah Betawi dan popularitasnya sebagai kandidat Pilgub Jawa Barat ditopang oleh posisinya sebagai wakil gubernur Jawa Barat mendampingi Ahmad Heryawan (periode 2013-2018). Pada pasangan Asyik, baik Sudrajat maupun Syaikh kurang begitu dikenal sebagai tokoh yang *nyunda*. Sudrajat adalah seorang purnawirawan TNI AD yang juga kader Partai Gerindra, sementara Ahmad Syaikh waktu itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat dan walikota Bekasi periode 2013-2018. Pada pasangan No. 4, Tb. Hasanudin dikenal

sebagai politisi Jawa Barat dan Ketua DPW PDIP Jawa Barat. Adapun pasangannya, Anton Charliyan, pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat.

Tabel 1. Pasangan kandidat, partai politik pengusung, dan perolehan suara

Pasangan kandidat	Partai politik pengusung	Suara (%)
Ridwan Kamil-Uu	Partai Nasdem, Partai Hanura, PKB, PPP	32,8
Tb. Hasanudin-Anton Charliyan	PDIP	23
Sudrajat-Syaikh	Partai Gerindra, PKS, PAN	28,8
Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi	Partai Demokrat, Partai Golkar	17

Sumber : (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, 2018)

Ajang Pilgub Jabar tahun 2018 kemudian dimenangkan oleh pasangan Rindu. Kemenangan Rindu dalam Pilgub Jabar tahun 2018 lalu tidak begitu mengejutkan, sebab dalam berbagai sigi Ridwan Kamil senantiasa menempati posisi sebagai kandidat terpopuler dengan elektabilitas tertinggi. Perolehan suara tertinggi kedua diraih oleh pasangan Asyik. Sementara itu, pasangan 2DM dan Hasanah masing-masing meraih posisi suara terbanyak ketiga dan keempat. Berikut rincian perolehan suara Pilgub Jabar tahun 2018.

Perilaku Memilih Orang Sunda

Aspek pertama yang dibahas tentang perilaku memilih orang Sunda, yakni tentang bagaimana persepsi pemilih Sunda terhadap latar belakang etnisitas atau seberapa besar mereka mempertimbangkan faktor etnisitas ketika memilih. Adapun dimensi etnisitas yang digambarkan, antara lain identitas suku dan agama. Selain etnisitas, dimensi sosiologis lainnya yang dapat mempengaruhi pertimbangan pemilih di dalam bilik suara, antara lain ketokohan, partai politik, dan keluarga. Dimensi tersebut juga dipengaruhi oleh faktor psikologis karena menyangkut preferensi selera yang sesuai dengan kepribadian individu pemilih.

Perilaku memilih biasanya dikaitkan dengan faktor-faktor sosiologis, seperti identitas agama, suku, dan pertimbangan keluarga. Sementara itu, faktor-faktor psikologis antara lain identifikasi partai dan ketokohan. Tetapi, pada penelitian ini pembagian semacam itu problematis. Sebagai contoh, pertimbangan berdasarkan kesamaan agama dan suku juga bisa berasal dari faktor psikologis. Karenanya, faktor-faktor agama, suku, ketokohan kandidat, partai politik merupakan faktor-faktor sosial yang biasanya dipertimbangkan oleh pemilih dalam memberikan suara.

Berdasarkan data yang diperoleh dari *exit poll*, pemilih Sunda menganggap penting faktor agama dan suku. Hal itu diketahui dari kecenderungan positif yang sangat tinggi, yakni sekitar 56 persen sangat setuju dan 35 persen setuju atas pertimbangan agama ketika memilih. Hasil tersebut mengilustrasikan bahwa pemilih Sunda memiliki kecenderungan religiusitas yang kuat dalam menentukan pilihan. Karakter religius pemilih Sunda sebagaimana yang tercermin dari data tersebut juga

mengkonfirmasi 2 (dua) asumsi umum. Pertama, bahwa Jawa Barat merupakan daerah konservatif keagamaan (Hamayotsu, 2021; Pelletier, 2021). Kedua, orang Sunda dikenal sebagai pribadi yang religius. Nilai-nilai keagamaan (Islam) senantiasa melekat dalam praktik kebudayaan Sunda yang tercermin dalam frasa populer bahwa “Sunda itu Islam.”

Di kalangan pemilih Sunda, faktor yang dianggap paling penting adalah kesamaan agama. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2, alasan kesamaan agama mendapatkan impresi yang sangat tinggi. Tingginya kecenderungan pemilih dengan pertimbangan kesamaan agama sesuai dengan anggapan bahwa Jabar adalah daerah yang religius secara politik. Meskipun kecenderungan yang sama tidak berlaku dalam konteks Pemilu legislatif, dimana partai politik agama (Islam) kurang mendapatkan suara yang besar di Jabar. Tingginya impresi pemilih Sunda terhadap latar belakang suku juga merupakan gejala umum, dimana suku-suku lain pun memiliki kecenderungan memilih kandidat dengan latar belakang suku yang sama.

Tabel 2. Faktor etnisitas dan sosio-kultural pemilih Sunda (dalam persen)

No	Faktor	STS	TS	N	S	SS
1	Satu agama	0,7	5,3	3	35	56
2	Satu suku	1,3	15,3	11,8	46,3	25,2
3	Ketokohan	1,5	18	18,7	46,3	15,5
4	Satu partai politik	2,7	27	19,5	38,3	12,5
5	Pengaruh keluarga	12,7	46,7	9,7	23,7	7,5

Catatan :

STS = Sangat tidak setuju
 TS = Sangat setuju
 N = Netral
 S = Setuju
 SS = Sangat setuju

Di samping identitas agama, pemilih Sunda juga menilai faktor kesukuan sebagai pertimbangan yang utama di dalam bilik suara. Dari hasil *exit poll*, diketahui bahwa sebagian besar pemilih Sunda menyatakan kesesuaiannya dengan faktor identitas suku. Sekitar 25,2 persen responden menyatakan sangat setuju dan 46,3 persen setuju memilih kandidat dengan melihat latar belakang kesukuan. Hasil ini menunjukkan bahwa pemilih Sunda, yang mungkin juga sama seperti pemilih etnis lainnya, cenderung bersifat primordial. Namun, penting untuk dicatat bahwa situasi Pemilu yang menjadi lokus adalah Pilgub Jawa Barat tahun 2018, dimana faktor etnis kandidat memiliki relevansi bagi pemilih dalam konteks kedaerahan. Dengan kata lain, primordialisme kesukuan tidak berdiri sendiri atau bersifat permanen melainkan dinamis dan berkelindan dengan faktor-faktor lainnya seperti lokus pemilihan, isu-isu, dan representasi etnis kandidat.

Pada Pilgub Jabar 2018, suara suku Sunda sebagian besar diraup oleh pasangan Rindu dengan raihan 44,5 persen. Akan tetapi porsinya tidak terpaut jauh dengan

pasangan Asyik dengan perolehan 34,5 persen. Sementara itu, pasangan 2DM memperoleh suara dari pemilih Sunda sebesar 17,8 persen. Porsi terkecil dari pemilih Sunda diperoleh pasangan Hasanah yang meraih 3,2 persen suara (lihat Tabel 3). Dari data tersebut, terdapat fakta yang cukup menarik yaitu pasangan Asyik meraih perolehan suara pemilih Sunda yang cukup besar, padahal mereka dianggap kurang menonjol tampil sebagai tokoh Sunda. Fenomena tersebut dapat dibaca secara kualitatif berdasarkan pengamatan terhadap dinamika kontestasi dan dikaitkan dengan tingginya aspek religiusitas pada pemilih Sunda (lihat Tabel 2).

Perhelatan Pilgub Jabar tahun 2018 berlangsung di tengah-tengah konstelasi politik nasional, dimana Partai Gerindra, PKS, dan PAN mendukung Prabowo sebagai calon kandidat presiden menjelang Pemilu tahun 2019. Di akar rumput, mereka didukung oleh kelompok-kelompok Islam yang bersimpati terhadap kekuatan oposisi pemerintahan Jokowi. Selama kampanye Pilgub, pasangan Asyik dan pendukungnya menggemakan *#2019GantiPresiden* sebagai ekspresi kekuatan oposisi terhadap kandidasi kembali Jokowi di 2019. Mobilisasi akar rumput yang cukup masif dan militan di kalangan pendukung pasangan Asyik memungkinkan arus suara yang signifikan kepada mereka (Djuyandi dkk, 2019). Padahal sebelumnya Asyik bukan pasangan yang populer di kalangan warga Jabar.

Tabel 3. Pilihan pada Pilgub Jabar 2018

No	Suku	Suara kandidat (persen)			
		Rindu	2DM	Asyik	Hasanah
1	Sunda	44,5	17,8	34,5	3,2
2	Jawa	53,8	17,9	23,1	5,1
3	Batak	55,6	7,4	14,8	22,2
4	Minangkabau	30	10	60	0
5	Tionghoa	100	0	0	0

Pada aspek pilihan berdasarkan suku, kami mendalami apakah para responden memilih berdasarkan kesadaran faktor kesamaan suku. Dari penelusuran tersebut, ternyata pemilih pasangan 2DM mendapatkan impresi paling tinggi, yakni dengan 20,4 persen responden menyatakan sangat setuju dan 42,7 persen setuju. Kandidat yang juga didukung pemilih yang menganggap faktor kesamaan suku adalah faktor penting adalah pasangan Rindu dengan besaran responden 19,2 persen menyatakan sangat setuju dan 42,1 persen setuju. Dengan kata lain kedua pasangan ini, yakni 2DM dan Rindu, memiliki impersona yang cukup tinggi sebagai sosok-sosok kandidat yang merepresentasikan tokoh Sunda.

Selain faktor identitas etnisitas, pemilih Sunda mempertimbangkan faktor ketokohan kandidat. Dalam rezim pemilihan langsung, ketertarikan pemilih terhadap sosok kandidat ketimbang partai politik merupakan hal yang lumrah. Dalam konteks pemilihan gubernur, tampak bahwa ketokohan atau popularitas kandidat menjadi pertimbangan utama. Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa sekitar 15 persen responden

menyatakan sangat setuju dan 46,3 persen setuju bahwa ketokohan merupakan faktor penting dalam memilih kandidat.

Berbeda dengan aspek etnisitas dan ketokohan, aspek memilih karena pengaruh keluarga dan kesamaan partai politik kurang begitu dominan dalam perilaku memilih orang Sunda. Sedikit pemilih Sunda yang menganggap keluarga sebagai referensi pilihan politik. Sebagaimana terlihat dari Tabel 2, responden yang mengaku sangat setuju dengan pilihan keluarga hanya 7,5 persen dan 23,5 persen setuju. Karena itu, pemilih Sunda dapat dikategorikan sebagai pemilih yang relatif independen dari preferensi keluarganya. Pada faktor kesamaan partai, pada Tabel 2 terlihat bahwa responden yang sangat setuju hanya 12,5 persen dan 38,3 persen yang menyatakan setuju. Pada Tabel 3, responden yang merasa tidak terikat partai politik tertentu sebesar 72,2 persen, yang menandakan pemilih Sunda tergolong memiliki tingkat identifikasi partai (*party id*) yang rendah. Hasil ini memverifikasi kecenderungan nasional bahwa kesamaan partai dalam Pemilu eksekutif bukan keutamaan bagi pemilih. Dari hasil sigi Indikator Politik Indonesia, misalnya, hanya sekitar 6,8 persen responden yang merasa memiliki kedekatan dengan partai politik (Salabi, 2021).

Dari para responden yang mengaku dekat dengan partai politik, Partai Bulan Bintang (PBB) memiliki pendukung paling banyak. Besarnya ormas Islam Persatuan Islam (Persis) di Jawa Barat sepertinya menjadi faktor di balik kuatnya loyalis PBB. Selanjutnya, Partai Golkar, PDIP, Partai Gerindra juga memiliki pendukung loyal dari orang Sunda dengan kisaran *party id* 4-5 persen. Sementara itu, partai politik Islam lainnya mendapatkan impresi 0,5-3 persen dari orang Sunda. Namun dalam penyelenggaraan Pemilu pasca Soeharto, partai politik yang mendapatkan suara besar di Jabar secara relatif konstan diantaranya Partai Golkar, PDIP, Partai Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat. Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun pemilih di Jabar dikenal religius ternyata partai politik bercorak Islam tidak dominan dari perolehan suara.

Tabel 4. Afiliasi politik pemilih dari suku Sunda

No	Partai politik	Persentase
1	PBB	7,7
2	Partai Golkar	4,8
3	PDIP	4,3
4	Partai Gerindra	4
5	PPP	2,5
6	PKB	1
7	PAN	0,8
8	Demokrat	0,8
9	PKS	0,8
10	Nasdem	0,7
11	PSI	0,3
12	Independen	72,2

Aspek berikutnya yang kami analisis terkait perilaku memilih orang Sunda adalah bagaimana persepsi mereka terhadap karakteristik personal dari kandidat.

Gambaran tersebut mengindikasikan bagaimana pemilih Sunda membayangkan karakteristik ideal seorang pemimpin. Adapun dimensi karakteristik personal kandidat yang ditelaah lebih lanjut adalah sifat atau personal yang melekat pada kepribadian kandidat, antara lain ramah/santun, berpenampilan menarik, dan tegas/berwibawa. Sementara di sisi lain yang juga diketahui adalah kapasitas personal, seperti tingkat pendidikan, perhatian terhadap rakyat, bersih dari korupsi, dan pengalaman di dalam pemerintahan. Berbagai dimensi tersebut mewakili kecenderungan preferensi personal kandidat atas dasar kesesuaiannya dengan nilai dan norma di masyarakat yang mengedepankan kualitas kepribadian dan kompetensi dari seorang pemimpin.

Tabel 5. Preferensi pemilih Sunda terhadap kandidat (dalam persen)

No	Karakteristik	STS	TS	N	S	SS
1	Ramah dan santun	0,2	0,7	6,2	52	41
2	Berpenampilan menarik	0,1	5	8,9	53,7	27,2
3	Tegas dan berwibawa	0,2	0	6,8	52,3	40,7
4	Berpendidikan	0,2	0,3	4,2	47,8	47,5
5	Perhatian pada rakyat	0,2	0,8	8,7	48,3	42
6	Bersih dari korupsi	0,2	0,5	9,8	46,3	43,2
7	Berpengalaman di pemerintahan	0,5	4,8	8,2	51,8	34,7

Catatan :

- STS = Sangat tidak setuju
- TS = Sangat setuju
- N = Netral
- S = Setuju
- SS = Sangat setuju

Berdasarkan data yang tertera pada tabel di atas, para pemilih Sunda tentu menunjukkan keserasiannya dengan nilai-nilai ideal seorang pemimpin. Semua dimensi karakteristik pemimpin yang positif mendapatkan impresi tinggi. Namun, dari semua dimensi yang ada pemilih Sunda cenderung memberikan preferensi yang lebih tinggi pada aspek kepribadian terutama pada sikap dan kompetensi, utamanya pada pendidikan. Impresi paling tinggi adalah kandidat dengan karakter berpendidikan, yang mana 47,5 persen responden menyatakan sangat setuju dan 47,8 persen setuju. Karakter berikutnya yang disukai oleh pemilih Sunda ialah tegas dan berwibawa dengan 40,7 persen responden menyatakan sangat setuju dan 52,3 persen setuju. Hal tersebut mencirikan bahwa preferensi atas karakteristik kandidat memiliki relevansi dengan budaya politik orang Sunda yang dikenal menyukai sosok pemimpin yang cerdas (berpendidikan), tegas dan berwibawa, serta hubungan sosial yang ramah dan santun.

Perilaku memilih diasumsikan dibentuk oleh kesadaran pemilih akan kondisi sosial ekonomi yang mereka alami atau amati dalam kehidupan sehari-hari. Sub-bahasan ini menggambarkan isu-isu yang dianggap penting bagi pemilih Sunda.

Berdasarkan hasil *exit poll*, isu pengangguran menempati posisi yang paling menjadi perhatian para responden dengan 31,1 persen. Isu-isu lainnya yang juga menjadi keprihatinan pemilih Sunda adalah kemiskinan dan kesejahteraan masing-masing 16 persen dan 14 persen, serta korupsi 10,6 persen. Persepsi responden tersebut sejalan dengan fakta bahwa pengangguran dan kemiskinan yang masih menjadi permasalahan di Jabar. Berdasarkan data BPS tahun 2020, jumlah pengangguran terbuka di Jabar mencapai 10,46 persen (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2021b). Angka tersebut lebih tinggi dari jumlah pengangguran nasional sebesar 7,07 persen pada Agustus 2020 (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2020). Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di provinsi ini mengalami kenaikan sekitar 544 ribu jiwa. Total penduduk miskin menjadi 3,92 juta jiwa (7,88 persen) (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2021a). Kemiskinan di Jawa Barat tergolong tinggi, meskipun secara statistik masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu 9,78 persen pada bulan dan tahun yang sama (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2021a).

Tabel 6. Isu-isu paling penting bagi pemilih (dalam persen)

No	Isu	Sunda	Jawa	Batak	Minang-kabau	Tionghoa
1	Pengangguran	31,1	25,3	0	20	12,5
2	Kemiskinan	16	14,9	0	0	12,5
3	Kesejahteraan	14	14,3	0	10	0
4	Korupsi	10,6	18,2	15	60	50
5	Kerusakan lingkungan	6,7	7,1	0	0	0
6	Infrastruktur	5,2	8,4	33	0	25
7	Diskriminasi	0	0	11,1	0	0
8	Pendidikan	0	0	14,8	0	0
9	Islam	0	0	0	10	0
10	Lainnya	16,4	11,8	26	0	0

Data di atas mengindikasikan bahwa pemilih Sunda mempertimbangkan kandidat yang memberikan perhatian pada isu-isu sosial ekonomi yang dihadapi oleh kebanyakan orang Sunda. Kecenderungan yang berbeda ditunjukkan oleh etnis lain yang secara sosial ekonomi tergolong mapan atau banyak dari kalangan pedagang, seperti suku Minangkabau dan etnis Tionghoa yang lebih memberikan perhatian pada isu korupsi. Menariknya, meskipun pemilih Sunda memiliki preferensi tinggi terhadap kandidat yang berpendidikan, tidak ada responden yang memberikan perhatian pada isu pendidikan dalam situasi Pilgub Jabar tahun 2018.

Penutup

Dari pemaparan hasil di atas, diketahui bahwa dari hasil kajian perilaku memilih menunjukkan tidak terdapat keunikan dari preferensi pemilih Sunda yang kecenderungan memilih berdasarkan agama dan etnisitas. Preferensi demikian juga berlaku pada suku lainnya. Namun, temuan kajian ini menegaskan bahwa perilaku

memilih berdasarkan etnisitas pada pemilih Sunda tetap utama, meskipun di tengah modernisasi, kompleksitas demografis, dan urbanisasi. Kecenderungan tersebut juga tidak berarti berlaku permanen pada setiap Pemilu ataupun menandakan situasi perpecahan yang mendorong pemilih Sunda mengevaluasi kandidat dari latar belakang agama dan etnisnya. Sejalan dengan Horowitz (1985), kajian ini menilai bahwa preferensi atas etnisitas yang cukup tinggi di kalangan pemilih Sunda lebih pada faktor psikologis dalam mempertahankan status kesundaan di Jabar sebagai kesatuan politik. Hal tersebut juga dimungkinkan oleh adanya motivasi pilihan pada Pemilu sebagai ekspresi dari suku Sunda dalam memperkuat identitas yang terhubung dengan tanah kelahirannya, Jabar.

Tulisan ini juga mendukung pernyataan Nathan (2016) bahwa berlakunya preferensi pemilih berdasarkan etnis terhadap kandidat tetap sejalan dengan proses politik yang demokratis. Hal itu terindikasi dari absennya friksi ataupun gejolak berlatar sentimen etnisitas antar-pendukung kandidat pada saat kontestasi Pilgub Jabar tahun 2018. Namun, kondisi demikian juga turut dimungkinkan oleh sifat kontestasi yang diikuti oleh para kandidat yang relatif homogen dari aspek etnisitas atau setidaknya tidak ada kandidat yang menonjolkan identitas yang berbeda dengan Suku Sunda. Kontestasi Pilgub Jabar tahun 2018 juga terbebas dari upaya-upaya kandidat dalam menjadikan etnisitas sebagai isu populis dalam rangka mengendalikan sumber daya. Dengan demikian, absennya strategi etnis menjadikan kontestasi Pilgub tidak mengarahkan dimensi etnis sebagai kekuatan instrumental di tengah-tengah masyarakat multi etnik di Jawa Barat.

Dilihat dari keterkaitannya dengan budaya politik Sunda, perilaku memilih pada pemilih Sunda menunjukkan karakter atau budaya politik orang Sunda. Pertama, budaya Sunda identik dengan religiusitas yang tinggi. Hal tersebut tampak dari faktor agama menjadi preferensi tertinggi dalam pertimbangan pemilih Sunda dan selaras dengan frasa populer di kalangan orang Sunda bahwa Sunda identik dengan Islam. Tetapi, religiusitas dalam budaya politik Sunda tidak dalam makna konservatisme politik yang mengancam nilai-nilai kemajemukan. Sebagaimana yang diungkapkan Warnaen (1987), orang Sunda tidak menyukai perebutan kekuasaan yang menjadikan suasana kekeluargaan menjadi rusak. Dalam realitas politik yang juga terungkap pada data kajian ini, pilihan politik orang Sunda relatif cair, independen, dan bahkan tidak terpaku pada partai politik bercorak agama. Religiusitas dalam budaya politik Sunda lebih tepat dipahami sebagai etik yang harus ditampilkan dalam karakter personal kandidat dan kebijakan yang harmoni dengan nilai dan norma budaya masyarakat.

Kedua, dalam menilai sosok kandidat pemilih Sunda mengedepankan sosok yang berpendidikan atau cerdas, ramah dan santun, serta berwibawa. Kualitas personal tersebut sejalan dengan budaya politik yang terkandung dalam mitos Pangeran Padjadjaran yang mengedepankan karakter pemikir, pasif, dan berwibawa. Kesukaan pemilih Sunda pada karakter pemimpin yang cerdas selaras dengan

berbagai mitos dan cerita rakyat dengan figur utamanya yang cerdas, seperti Ciungwanara dan Si Kabayan. Preferensi atas sosok yang ramah dan santun menyiratkan sebagian sifat orang Sunda itu sendiri yang cenderung menghindari konflik atau persaingan. Dalam konteks politik, sikap seperti ini dapat mendorong budaya politik yang pasif. Preferensi atas karakter pemimpin berwibawa mencerminkan bahwa budaya politik orang Sunda menuntut adanya penghormatan. Budaya politik orang Sunda yang juga terkonfirmasi dalam kajian ini adalah sifat paradoksal, yang mana di satu sisi orang Sunda menyukai pemimpin yang cerdas, tetapi di sisi lain mereka tidak begitu perhatian terhadap isu pendidikan. Paradoks tersebut barangkali terkait dengan permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi oleh orang Sunda, yakni ketimpangan sebagai akibat modernisasi dan urbanisasi yang masif dan cepat sehingga isu-isu yang disoroti oleh pemilih Sunda cenderung pada masalah kesejahteraan.

Pada akhirnya kajian ini mengemukakan adanya refleksi budaya politik dalam perilaku memilih yang disasar pada populasi etnik. Kajian perilaku pemilih untuk mengungkap budaya politik etnik dapat digunakan dalam upaya memahami keterkaitan ciri-ciri etnisitas pada kelompok etnik dalam proses politik, utamanya pemilihan. Kajian ini mengandung kekurangan-kekurangan, antara lain tidak dilengkapi dengan pendalaman hasil wawancara atau *Focus Group Discussion* (FGD) dari para tokoh budayawan dan politisi Sunda. Namun, tulisan ini dapat mengilustrasikan budaya politik kontemporer pada suku Sunda dan temuan-temuannya penting untuk diperdebatkan lebih lanjut dalam kajian budaya politik kontemporer.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Pusat Studi Politik dan Demokrasi FISIP Universitas Padjadjaran karena telah membantu dalam penyediaan data.

Pendanaan

Penulisan artikel ini dilakukan atas pembiayaan dari dana Hibah Internal Universitas Padjadjaran (HIU).

Daftar Pustaka

- Al-Banjari, M. (2017). *Budak Angon: Diskursus Kepemimpinan Sunda Menuju Kekuasaan*. Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Almond, G., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. New Jersey: Princeton University Press.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2020, July 15). Tingkat Kemiskinan Jawa Barat Maret 2020 Sebesar 7,88 persen dan Ketimpangan Pendapatan Sebesar 0,403.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2021a, February 15). Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2021b, February 18). Agustus 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen.
- Barelly, A. M., Muhammad, M., Kambo, G. A., & Abdillah, A. (2021). The Political Identity of Ethnicity in the Local Election of Makassar City 2018. *Journal of Governance*, 6(2). <https://doi.org/10.31506/jog.v6i2.12719>
- Barth, F. (1959). *Political Leadership Among Swat Pathans*. London: Athlone Press.
- Berezin, M., Sandusky, E., & Davidson, T. (2020). Culture in Politics and Politics in Culture: Institutions, Practices, and Boundaries. In T. Janoski, C. De Leon, J. Misra, & I. W. Martin (Eds.), *The New Handbook of Political Sociology* (pp. 102–131). New York: Cambridge University Press.
- BPS-Jabar. (2020). *Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2020*. Bandung.
- Burns, G. (1996). Studying the political culture of American Catholicism. *Sociology of Religion*, 57(1), 37–53.
- Chandra, K. (2014). *Why Ethnic Parties Succeed*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Chauchard, S. (2016). Unpacking ethnic preferences: Theory and micro-level evidence from north India. *Comparative Political Studies*, 49(2). <https://doi.org/10.1177/0010414015609356>
- Djuyandi, Y., Riadi, B., Ulhaq, M. Z., & Drajat, D. (2019). Strategi Kampanye Sudrajat-Syaikhu Mendapat Dukungan Masa Populisme Islam Dalam Pilgub Jawa Barat 2018. *Journal of Political Issues*, 1(1).
- Dobratz, B. A., Waldner, L. K., & Buzzel, T. (2016). *Power, Politics, and Society: An Introduction to Political Sociology*. New York: Routledge.
- Foster, C. R. (1982). Political Culture and Regional Ethnic Minorities. *The Journal of Politics*, 44(2), 560–568. <https://doi.org/10.2307/2130600>
- Geertz, C. (1976). *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press.
- Gowricharn, R. (2019). The decline of ethnic voting patterns in plural societies: Evidence from Suriname. *Politics*, 39(4). <https://doi.org/10.1177/0263395718782388>
- Hale, H. E. (2004). Explaining ethnicity. *Comparative Political Studies*, 37(4), 458–485.
- Hamayotsu, K. (2021). Making the majority in the name of Islam: Democratization, moderate-radical coalition, and religious intolerance in Indonesia. In C. Formichi (Ed.), *Religious Pluralism in Indonesia: Threats and Opportunities for Democracy* (pp. 58–83). Ithaca: Cornell University Press.

- Higashikata, T., & Kawamura, K. (2015). Voting behavior in Indonesia from 1999 to 2014: Religious cleavage of economic performance? In *Institute of Developing Economics*.
- Horowitz, D. (1985). *Ethnic Groups in Conflict*. Berkeley: University of California Press.
- Kolne, Y., & Festianto, D. (2018). Politik Etnis Flores Timur di Kabupaten Timor Tengah Utara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015. *Politika*, 9(2), 82–92.
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. (2018, July 8). Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.
- Kristianus. (2016). Politik dan Strategi Budaya Etnik dalam Pilkada Serentak di Kalimantan Barat. *Indonesian Political Science Review*, 1(1), 87–101.
- Liadi, H. F., & Erawati, D. (2020). *Politik Identitas pada Pilkada Kalimantan Tengah: Tatapan Mata Warga Bakumpai terhadap Pilkada Kalimantan Tengah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Liddle, R. W., & Mujani, S. (2007). Leadership, Party, and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia. *Comparative Political Studies*, 40(7), 832–857. <https://doi.org/10.1177/0010414006292113>
- Long, J. D., & Gibson, C. C. (2015). Evaluating the roles of ethnicity and performance in African elections: Evidence from an exit poll in Kenya. *Political Research Quarterly*, 68(4). <https://doi.org/10.1177/1065912915608946>
- Madrid, R. L. (2010). The Rise of Ethnic Politics in Latin America. In *The Rise of Ethnic Politics in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139022590>
- Mujani, S. (2020). Religion and Voting Behavior: Evidence from the 2017 Jakarta gubernatorial Election. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 58(2), 419–450. <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.582.419-450>
- Nathan, N. L. (2016). Local Ethnic Geography, Expectations of Favoritism, and Voting in Urban Ghana. *Comparative Political Studies*, 49(14). <https://doi.org/10.1177/0010414016655540>
- Nelson, D. C. (1979). Ethnicity and Socioeconomic Status as Sources of Participation: The Case for Ethnic Political Culture. *American Political Science Review*, 73(4), 1024–1038. <https://doi.org/10.2307/1953987>
- Nope, K. F. N., Herdiansah, A. G., & Darmawan, W. B. (2021). Politisasi Identitas dalam Pemilihan Nusa Tenggara Timur Tahun 2018. *Wacana Publik*, 15(1), 35–41.
- Pelletier, A. (2021). Competition for religious authority and Islamist success in Indonesia. *Comparative Politics*, 53(3).

- Qodim, H. (2013). Politik Identitas Sunda: Pergulatan Ideologi Kebudayaan dan Politik Kekuasaan. In *Lembaga Penelitian UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Robinson, A. L. (2014). National versus ethnic identification: Modernization, colonial legacy, and the origins of territorial nationalism. *World Politics*, 66, 709–746.
- Salabi, A. (2021, February 8). Party ID Rendah, Pemilih Merasa Lebih Terwakili oleh Anggota DPR, Bukan Partai.
- Sujatmiko, I. G. (2014). Keterwakilan Etnis di Politik Nasional: Kasus Etnis Sunda di Republik Indonesia. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 19(1), 1–26. <https://doi.org/10.7454/mjs.v19i1.4327>
- Sumardjo, J. (2015). *Sunda: Pola Rasionalitas Budaya*. Bandung: Kelir.
- Syukur, A. (2011). Islam, Etnisitas, dan Politik Identitas: Kasus Sunda. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 35(2), 407–426. <https://doi.org/10.30821/miqot.v35i2.151>
- Van Bruinessen, M. (1989). *Agha, Shaikh and State: The Social and Political Structures of Kurdistan*. London: Zed Books.
- Warnaen, S. (1987). *Pandangan Hidup Orang Sunda Seperti Tercermin Dalam Tradisi Lisan dan Sastra Sunda; Penelitian Tahap II (Konsistensi dan Dinamika)*. . Bandung.
- Zuhro, S., Sumarno, Pahlemy, W., Rochayati, N., Mulyani, L., & Iskandar, I. (2009). *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali*. Yogyakarta: Ombak.

Tentang Penulis

Ari Ganjar Herdiansah merupakan dosen di Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran. Spesialisasinya terletak pada kajian sosiologi politik yang mencakup area riset antara lain budaya politik, politik Islam, dan gerakan sosial.

Husin M. Al-Banjari adalah dosen di Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran. Mengkhususkan diri pada kajian politik Sunda, kepemimpinan politik, dan politik Islam.